

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan taman aktif di wilayah perkotaan Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori *Public Strategy* menurut Geoff Mulgan (2009), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan (*Purposes*)

DLHK Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan dua tujuan utama dalam pengembangan taman aktif di wilayah perkotaan, yakni pemenuhan target luasan RTH sebesar 20% sesuai amanat regulasi, serta perbaikan kualitas lingkungan sekaligus penyediaan ruang publik aktif yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Tujuan kedua telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, tercermin dari tersedianya taman aktif dengan fasilitas ramah bagi anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Meskipun demikian, tujuan pertama yakni pemenuhan target luasan 20% RTH publik belum sepenuhnya tercapai, sehingga aspek Tujuan secara keseluruhan dinilai belum efektif.

2. Lingkungan (*environment*)

Pada indikator lingkungan, ditemukan adanya faktor pendukung internal berupa keberadaan SOP yang menjadikan pelaksanaan teknis pengelolaan taman aktif lebih teratur, serta kerja sama lintas OPD yang memperlancar koordinasi. Dari sisi eksternal, dukungan CSR dari perusahaan di Kabupaten Sidoarjo dan kolaborasi

dengan akademisi melalui MoU menjadi modal yang berharga bagi pengembangan taman aktif. Di sisi lain, keterbatasan SDM, efisiensi anggaran, kondisi sarana dan prasarana yang masih memerlukan perbaikan, keterbatasan lahan akibat alih fungsi lahan di kawasan perkotaan, serta masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat pengguna taman aktif menjadi tantangan yang berdampak langsung pada kualitas pengelolaan. Oleh karena itu, aspek Lingkungan secara keseluruhan dinilai belum efektif.

3. Arahan (*Direction*)

DLHK Kabupaten Sidoarjo telah memiliki landasan arahan yang kuat dan berjenjang. Arahan dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi landasan hukum utama dalam menetapkan target pengembangan taman aktif, sementara arahan dari pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022, RPJMD Kabupaten Sidoarjo, serta Renstra dan Rencana Induk RTH DLHK menjadi pedoman operasional yang terstruktur. Keseluruhan instrumen tersebut memberikan kepastian hukum, kejelasan kewenangan, serta arah pelaksanaan yang jelas dalam pengembangan taman aktif di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, Aspek Arahan dinilai efektif dalam mendukung strategi pengembangan taman aktif di Kabupaten Sidoarjo.

4. Tindakan (*Action*)

DLHK Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan berbagai tindakan strategis dalam pengembangan taman aktif, yakni penyusunan Rencana Induk RTH, revitalisasi taman aktif, penambahan lahan melalui pemanfaatan fasilitas umum,

serta edukasi lingkungan kepada masyarakat. Sebagian tindakan tersebut telah menunjukkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna taman aktif. Namun demikian, masih terdapat kendala pada pelaksanaannya, terutama keterlambatan serah terima fasilitas umum dari pengembang, lemahnya pengawasan pasca-proyek revitalisasi, serta belum meratanya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas taman aktif. Oleh karena itu, aspek Tindakan dinilai belum efektif, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek pengawasan pelaksanaan untuk mendukung pengembangan taman aktif yang lebih optimal.

5. Pembelajaran (*Learning*)

DLHK Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan mekanisme pembelajaran organisasi melalui monitoring berkala terhadap kondisi taman aktif, sistem pengawasan berbasis wilayah dengan tim kerja terspesialisasi, pelaksanaan rapat evaluasi rutin, serta penyediaan layanan pengaduan berbasis *website*. Mekanisme internal tersebut telah berjalan cukup baik sebagai forum evaluasi kinerja dan perumusan langkah perbaikan. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi masih rendah, ditandai dengan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap layanan pengaduan yang telah disediakan. Oleh karena itu, aspek Pembelajaran dinilai belum efektif, karena masih membutuhkan penguatan sistem monitoring yang lebih terintegrasi serta peningkatan partisipasi masyarakat agar proses pembelajaran organisasi dapat berjalan lebih optimal.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan taman aktif di wilayah perkotaan belum sepenuhnya efektif, meskipun telah menunjukkan capaian yang sesuai dengan dimensi *Public Strategy* Geoff Mulgan (2009). Dari lima indikator yang dianalisis, hanya ***Direction*** yang tergolong efektif, sedangkan ***Purposes***, ***Environment***, ***Action***, dan ***Learning*** masih berada pada kategori cukup efektif serta memerlukan perbaikan. Kejelasan arah kebijakan belum didukung oleh kapasitas pelaksanaan yang optimal, yang terlihat dari belum tercapainya target luasan RTH, keterbatasan SDM dan anggaran, lemahnya pengawasan pascaproyek, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada kesenjangan antara strategi yang telah dirumuskan dengan kapasitas implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan dan penyempurnaan strategi agar pengembangan taman aktif di wilayah perkotaan Kabupaten Sidoarjo dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna mendukung peningkatan efektivitas strategi pengembangan taman aktif di wilayah perkotaan Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan strategi baru dalam penambahan luasan taman aktif. Mengingat target penyediaan RTH publik sebesar 20% belum tercapai melalui strategi yang berjalan saat ini, DLHK perlu merumuskan pendekatan baru yang

lebih inovatif, misalnya melalui skema insentif bagi pengembang yang tertib menyerahkan fasilitas umum tepat waktu, penerapan konsep taman aktif vertikal atau taman mini pada lahan-lahan sempit di kawasan padat perkotaan, serta penjajakan skema pembiayaan alternatif seperti *creative financing* atau kemitraan pemerintah swasta (KPBU) untuk mempercepat penyediaan taman aktif baru.

2. Perluasan kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi. Kerja sama melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perlu terus diperkuat dan diperluas dengan melibatkan lebih banyak perusahaan sebagai mitra dalam pengembangan taman aktif, baik melalui penyediaan fasilitas pendukung maupun pembangunan dan revitalisasi taman. Kolaborasi dengan akademisi juga perlu ditingkatkan tidak hanya dalam penyusunan dokumen perencanaan, tetapi juga dalam pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program yang telah dijalankan.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo perlu menyusun mekanisme pengawasan baru yang lebih ketat, baik pada tahap pelaksanaan proyek revitalisasi maupun pada masa pemeliharaan setelah serah terima taman aktif yang telah direvitalisasi.
4. Meningkatkan sosialisasi terhadap layanan pengaduan berbasis website yang telah tersedia, agar partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dapat meningkat dan mekanisme pembelajaran organisasi dapat berjalan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sebagai pengguna taman aktif.